

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdullah Marlang. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. As Center. Makassar.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2016. *Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- AK Moch Anwar. 2001. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkeng Offset. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Erdianto Effendy. 2011. *Hukum Pidana Indonesia. Suatu Pengantar*. Reflika Aditama. Bandung
- Erwin Susilo. 2020. *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.A. Zainal Abidin. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group. Depok.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Badai Anugrah. 2020. *Hentikan Kriminalisasi Petani di Kawasan Hutan (Studi kasus dalam perkara tindak pidana kehutanan)*. Guepedia.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertain Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya. Jakarta.
- Salim. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*. PT. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya. Semarang.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. PT. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

- Abdul Rahman Upara. 2015. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. *Legal Pluralism*. Volume 5. Nomor 1.
- Fuzi Narindrani. 2018. Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia. *De Jure*. Volume 18. Nomor 2.
- Ike Indra Agus Setyowati. 2018. Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak. *Media Iuris*. Volume 1. Nomor 2.
- Sandro Unas. 2019. Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Et Societatis*. Volume 7. Nomor 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MENHUT-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:
66/Pid.Sus/2017/PN.Gto

INTERNET

<http://eprints.umm.ac.id/36240/3/jiptumpp-gdl-sitiwuland-47469-3-babii.pdf> (Diakses pada tanggal 10 Februari 2021)